

PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal Provinsi Jambi Kode pos 36514 (0742)21238

Pos-el: itkabtjb@gmail.com Laman: <http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id>



LAPORAN HASIL REVIU

ATAS

**SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2025**

Nomor : 700.1.2.1/ 707 / lsp /2025

Tanggal : 17 Oktober 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
INSPEKTORAT DAERAH

Kompleks Gedung Bersama Jalan Jendral Sudirman Kuala Tungkal
Kode Pos 36514 Telp. (0742) 21238 E-mail : itkabtib@gmail.com Website:
<http://inspektorat.tanjabbarkab.go.id/>

Kuala Tungkal, 17 Oktober 2025

Nomor : LHE – 700.1.2.1/707/M/ISP/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kab. Tanjung Jabung Barat
Tahun 2025.

Kepada Yth:
Sdr. Kepala Dinas Tanaman
Pangan dan Hortikultura Kab.
Tanjung Jabung Barat
di-

Kuala Tungkal

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

1. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

WP	KT
	

- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 89 tahun 2021 tentang penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- 8) Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor:9
- 9) 1/Kep.Bup/Isp/2025 tentang Program Kerja Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2025;
- 10) Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 800.1.11.1/151/ST/Isp/X/SRK/2025 tanggal 3 s/d 14 oktober 2025 tentang Melakukan Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tunkal Ulu, dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

b. Latar Belakang Evaluasi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88

WP	KT
	

tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP terhadap OPD dan Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan secara khusus Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

Pelaksanaan evaluasi AKIP harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, diperlukan suatu pedoman evaluasi AKIP yang dapat dijadikan panduan bagi para evaluator. Pedoman evaluasi AKIP tersebut yakni Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Evaluasi AKIP diawali dengan perumusan tujuan evaluasi, kemudian dilanjutkan dengan penentuan ruang lingkup evaluasi, perancangan desain evaluasi, menentukan mekanisme pelaksanaan evaluasi, diakhiri dengan pelaporan dan pengomunikasian hasil evaluasi.

Hasil Asistensi yang di fasilitasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan fokus perubahan kertas

WP	KT
	

kerja evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Bahwa hasil pembahasan Kertas Kerja Evaluasi telah terjadi perubahan (revisi) pada Sub-Komponen/Kriteria, yang disesuaikan dengan kertas kerja evaluasi Pemerintah Daerah.

c. Tujuan Evaluasi

- 1) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.
- 2) Pelaksanaan evaluasi AKIP secara khusus bertujuan untuk:
 - a) Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup Evaluasi

- 1) Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penyelenggaraan SAKIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:
 - a) Perencanaan Kinerja;
 - b) Pengukuran Kinerja;
 - c) Pelaporan Kinerja;
 - d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, perencanaan kinerja jangka menengah, dan perencanaan kinerja jangka pendek. Termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pengukuran kinerja, dan monitoring pengelolaan data kinerja, sampai pada pelaporan hasil kinerja, serta evaluasi atas pencapaian kinerja.

WP	KT
	

Dalam penerapannya, ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- a) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- d) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja; dan
- e) Penilaian capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya.

Evaluasi AKIP Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari kerja mulai tanggal 03 Oktober s/d 14 Oktober 2025.

e. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Dalam hal ini, evaluator perlu menjelaskan tujuan evaluasi AKIP, aktivitas evaluasi yang akan dilakukan, serta kendala yang akan ditemukan dalam evaluasi kepada pihak yang dievaluasi. Langkah pragmatis ini diambil agar dapat lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP sehingga dapat menghasilkan rekomendasi hasil evaluasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Teknik dalam evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, antara lain:

WP	KT
	

1) *Ceklist* Pengumpulan Data dan Informasi

Ceklist kebutuhan data dan informasi berisi daftar dokumen, data, dan/informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan evaluasi AKIP, sehingga pihak penyedia informasi dan data (responden) dapat memenuhi kebutuhan tersebut;

2) Komunikasi melalui Tanya Jawab Sederhana

Komunikasi dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung, maupun melalui media telekomunikasi yang tersedia, seperti telepon, chat, ataupun digital meeting. Dalam hal ini, sebaiknya disiapkan terlebih dahulu jadwal dan catatan mengenai hal-hal atau materi yang akan ditanyakan;

3) Observasi

Merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan melakukan pengamatan terhadap suatu aktivitas. Observasi di sini dimaksudkan dalam pengertian sempit, yaitu observasi dengan menggunakan alat indera seperti mengunjungi lokasi dalam rangka mengamati proses dan jalannya aktivitas;

4) Studi Dokumentasi

Merupakan teknik mengumpulkan data dan informasi yang tidak secara langsung ditujukan kepada atau diperoleh dari instansi pemerintah/unit kerja yang dievaluasi, melainkan melalui sumber literasi lain seperti peraturan perundangan dan media informasi baik cetak maupun elektronik/digital.

f. Gambaran Umum Unit Kerja

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sedangkan Tupoksinya diatur dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Dalam kedudukan dan fungsinya Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat, memiliki posisi yang

WP	KT
	

sangat penting karena keberhasilan tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan dibidang pertanian, dalam melaksanakan tugas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Merumuskan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- 2) Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 3) Menginventarisir seluruh permasalahan-permasalahan di bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian dan memberikan alternatif pemecahan masalah;
- 4) Mengatur dan mengawasi balai benih komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- 5) Menyelenggarakan laboratorium dan pengujian mutu hasil dalam lingkup tanaman pangan dan hortikultura;
- 6) Menyelenggarakan penggunaan air irigasi berdasarkan peraturan provinsi;
- 7) Menyelenggarakan pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit;
- 8) Menyelenggarakan penanggulangan hama dan penyakit tanaman pangan dan hortikultura;
- 9) Menyelenggarakan pemberian izin usaha distribusi sarana produksi tanaman pangan dan hortikultura (pupuk, obat-obatan, peralatan dan sejenisnya) serta pengawasan;
- 10) Mengembangkan komoditi tanaman pangan dan hortikultura unggulan daerah;
- 11) Melaksanakan kerjasama antar kabupaten/kota dan provinsi dalam penanganan tanaman pangan dan hortikultura;
- 12) Menyelenggarakan dan mengawasi pembibitan/pembenihan tanaman pangan dan hortikultura;

WP	KT
	

- 13) Menyelenggarakan pelayanan minimal dalam tanaman pangan dan hortikultura;
- 14) Menetapkan rencana pengembangan usaha tani menuju agribisnis;
- 15) Meningkatkan Upaya peningkatan pendapatan daerah bidang tanaman pangan, hortikultura, pengelolaan lahan dan air, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- 16) Mengola urusan rumah tangga dan ketata-usahaan dinas;
- 17) Mengkoordinasikan dan membina sekretaris dan bidang dibawah lingkup tugasnya;
- 18) Mengkoordinasikan dan membina unit pelaksana teknis dinas dibawah lingkup tugasnya;
- 19) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Bupati;

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dan analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dins Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut:

- 1) Luas lahan pertanian sub sektor tanaman pangan semakin menurun disebabkan alih fungsi lahan. Banyaknya lahan pertanian sub sektor tanaman pangan yang beralih fungsi ke sub sektor perkebunan (kelapa sawit dan pohon pinang) karena dianggap lebih menguntungkan;
- 2) Perubahan iklim yang disebabkan karena pemanasan global yang dapat mengganggu jadwal tanam, mengakibatkan bencana kekeringan sehingga menimbulkan resiko kegagalan produksi;

WP	KT
	

- 3) Rendahnya luas tampab tanam tanaman padi di musim tanam April – September. Gerakan indeks pertanaman dua kali (IP-200) sulit diterapkan diwilayah/daerah ilir;
- 4) Pengelolaan air yang buruk, terutama dilahan rawa lebak, menjadi kendala utama karena air terlalu tinggi saat musim hujan dan berkurang saat kemarau;
- 5) Lahan pertanian yang semakin kritis karena salah dalam pengelolaan daan penggunaan sarana produksi (pupuk, herbisida, dan pestisida non organic) secara terus menerus dan berlebihan;
- 6) Produksi beras, tanaman pangan pokok, mengalami stagnasi atau bahkan penurunan, sehingga mengancam ketahanan pangan;
- 7) Prasarana pertanian yang belum memadai, seperti irigasi, JUT, dan minimnya penggunaan teknologi pertanian yang hemat energi dan ramah lingkungan;
- 8) Jumlah petani yang semakin berkurang;
- 9) Jumlah penyuluh pertanian yang belum memadai

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Merupakan Tujuan pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian. Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu.

g. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Unit Kerja

Implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran

WP	KT
	

berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal pengetahuan yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan Perangkat Daerah.

Secara umum, implementasi SAKIP Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada aspek perencanaan kinerja telah sesuai standar dan dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.

Pengukuran kinerja telah dilakukan cukup memadai, tetapi belum sepenuhnya dapat dibuktikan bahwa pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian organisasi, strategi dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai target kinerja.

Pelaporan kinerja telah disusun sesuai standar, dan telah menyajikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja. Informasi di dalam Pelaporan Kinerja perlu digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan digunakan untuk mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

Evaluasi akuntabilitas kinerja telah dilakukan cukup memadai dan cukup mendalam. Telah dilakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk dapat dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

h. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja terhadap Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2024 yakni 70,21 atau predikat "BB" (Sangat Baik). Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit

WP	KT
	

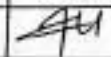
kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon3/koordinator. pada rekomendasi untuk perbaikan yang telah diberikan, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menindak lanjuti rekomendasi tersebut, namun terdapat rekomendasi yang masih dalam status On Progres/dalam proses sehingga belum bisa di pastikan capaian atau hasil dari tindak lanjut yang di laksanakan.

2. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Kondisi, berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada:

Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
2	A	> 80 - 90	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 / Pengawas / Subkoordinator.
3	BB	> 70 - 80	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon3 / koordinator.
4	B	> 60 - 70	Baik

WP	KT
	

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerjautama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
5	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	C	> 30 - 50	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi system manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	D	> 0 - 30	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025 atas masing-masing komponen kinerja berdasarkan kertas kerja evaluasi sebagai berikut:

1) Perencanaan Kinerja

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya di jabarkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Perencanaan Lainnya. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura juga telah memiliki sasaran dan indikator kinerja yang berorientasi hasil, hal ini merupakan dampak dari perbaikan sistem manajemen kinerja yang ditunjukan pada meningkatnya komitmen pimpinan daerah bersama dengan kepala perangkat daerah dalam memperbaiki kualitas perencanaan kinerja.

WP	KT
	

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja di antaranya sebagai berikut:

- a) Masih terdapat Indikator program dan indikator kegiatan yang belum selaras serta belum mengakomodir, guna tujuan dan sasaran program kegiatan;
- b) Terdapat 1 Perjanjian Kinerja (PK) eselon 3 yang belum ditandatangani atasan yaitu pada bidang Hortikultura;
- c) Masih terdapat indikator kinerja yang belum SMART. Yaitu di Indikator peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura ditunjukkan dengan capaian (persentase);
- d) Masih ada indikator operasional yang sama dengan sasaran yang berbeda, terdapat indikator operasional peningkatan produktivitas yang membahas sarana, harusnya di indikator taktikal sarana prasarana, indikator operasional yang tidak tepat yakni indikator jumlah balai, harusnya jumlah terselenggaranya;
- e) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum maksimal dalam hal, dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis. Ditunjukkan pada Renstra dengan ada target yang masih tetap dan tidak menantang;
- f) Dokumen Indikator Kerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), perjanjian kerja (PK), Laporan Kinerja (LKJ) telah diupload di website e-SR (e-Sakip Reviu);
- g) Di dalam Perjanjian Kerja (PK) untuk eselon II, III dan IV terdapat Indikator Kinerja yang sama antara Kepala Bidang Tanaman Pangan dengan Kepala Bidang Sarana Prasarana yaitu pada Indikator Kinerja Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan dengan target yang sama 2%.

2) Pengukuran Kinerja

Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura telah melakukan pengukuran secara berkala atas realisasi kinerja dan telah memiliki rencana aksi untuk pencapaian kinerja. Dokumen Indikator Kinerja (IKU) yang melengkapi pedoman formulasi perhitungan juga telah disusun untuk mendukung pelaksanaan kinerja.

WP	KT
	

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan dokumen yang telah disampaikan kepada tim evaluator diantaranya Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor: 000.7.2/608/DTPH/VIII/2025, Tanggal 13 Agustus 2025;
- b) Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Insatasi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 telah memuat capaian kinerja organisasi;
- c) Pemantauan telah dilakukan hingga unit terkecil namun tidak diberikan feedback.

3) Pelaporan Kinerja

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja, Laporan kinerja tersebut telah menyajikan realisasi kinerja yang telah diperjanjikan.

Namun demikian, masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);
- b) Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti, namun terdapat beberapa rekomendasi yang masih dalam status On Progress, artinya belum bisa dipastikan hasil capaian dari tindak lanjut yang direkomendasikan.

b. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyelarasan indikator program dan kegiatan dengan memperhatikan hierarki kinerja (Cascading) dari sasaran strategis, program dan kegiatan;

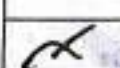
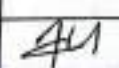
WP	KT
	

- 2) Melakukan penandatanganan PK (Perjanjian Kinerja) yang belum ditandatangani oleh pejabat/atasan guna menjamin legalitas dan akuntabilitas kinerja individu;
- 3) Meningkatkan kualitas penetapan target agar lebih menantang namun tetap realistis, dengan memperhatikan aspek tren capaian sebelumnya dan sumber daya yang tersedia;
- 4) Melakukan perbaikan pada indikator jumlah BPP (Balai Penyuluh Pertanian) yang sebaiknya jumlah terselenggaranya kegiatan agar lebih menggambarkan outcome;
- 5) Melakukan pemisahan indikator sesuai tugas dan fungsi bidang agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab dan memudahkan evaluasi capaian masing-masing bidang;
- 6) Membuat atau melakukan mekanisme umpan balik formal (Feedback) dalam bentuk evaluasi agar pelaksana yang dilakukan pemantauan dapat memperoleh arahan atau perbaikan pada kinerja berikutnya;
- 7) Membuat aksi tindak lanjut terhadap setiap rekomendasi dengan timeline waktu yang jelas, pasti, dan penanggung jawab, serta melaporkan progres berjalannya tindak lanjut secara seksama.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Hasil Evaluasi menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperoleh nilai **75,44** atau predikat **"BB"** (Sangat Baik). Penilaian tersebut menunjukkan bahwa Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon3 / koordinator. Nilai Akuntabilitas Kinerja tersebut untuk dapat dipertahankan dan dilakukan inovasi dan pematangan di dalam

WP	KT
	

45

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2025 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.


INSPEKTUR DAERAH
JARKASIH, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

TembusandisampaikanKepadaYth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

WP	KT
X	gu

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai penerapan manajemen kinerja Tahun 2025 pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Kami mengharapkan agar saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan menindaklanjuti rekomendasi yang kami berikan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

INSPEKTUR DAERAH



Drs. ENCEP JARKASIH, CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP. 19701201 199009 1 001

TembusandisampaikanKepadaYth:

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal;
2. Bapak Wakil Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal.

WP	KT
X	fu

pengukuran kinerja, dan pemanfaatan hasil pengukuran kinerja untuk penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.

Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen	Total Bobot	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
1	Perencanaan Kinerja	30%	22,58
2	Pengukuran Kinerja	30%	21,73
3	Pelaporan Kinerja	15%	11,39
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja		100%	75,44

b. Dorongan Terhadap Implementasi SAKIP yang Lebih Baik

Implementasi SAKIP yang lebih baik akan mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP itu sendiri, yaitu meningkatnya kinerja dan akuntabilitas Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhadap kinerjanya.

WP	KT
	



INSPEKTORAT DAERAH

SURAT TUGAS

Nomor 800.1.11.1/151/ST/lsp/X/SRK/2025

Dasar :

1. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 245/KEP.BUP/BKAD/2025 tentang Standarisasi Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2025.
3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 91/KEP.BUP/ISP/2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

MEMERINTAHKAN :

Kepada :

No	Nama	NIP	Jabatan dalam Tim
1	Drs. ENCEP JARKASIH, C.G.C.A.E.	19701201 199009 1 001	Penanggungjawab
2	ANDI RAHMATIAH, S.E.	19700705 199003 2 003	Wakil Penanggungjawab
3	ZELLY NOFDWI YENTI, S.E.	19771119 200904 2 002	Ketua
4	NURIA NINGSIH, A.Md.	19740430 200501 2 007	Anggota
5	ETTY RAHAYU JAMIL, S.E.	19900608 202504 2 007	Anggota
6	AHMAD SYUKRI, S.AP	19681010 199002 1 003	Anggota
7	TATI MEGAWATI	19801225 200701 2 018	Anggota

Untuk :

1. Melakukan pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Tahun 2025 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura, Dinas Perikanan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kecamatan Renah Mendaluh, Kecamatan Tungkal Ulu dan Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Tugas tersebut dilaksanakan dari tanggal 3 s.d. 14 Oktober 2025 selama 10 Hari.
3. Melaporkan diri kepada pejabat setempat guna pelaksanaan tugas tersebut dan terkait dalam pelaksanaan tugas ini diharapkan bantuannya.
4. Melaksanakan tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan tugasnya kepada pejabat yang berwenang.

Demikian untuk diketahui dan diberikan kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut diatas untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

ditetapkan di : Kuala Tungkal
pada tanggal : 3 Oktober 2025

Inspektur Daerah,



Drs. Encep Jarkasih, C.G.C.A.E.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701201 199009 1 001

TABLE IV
FRACTIONAL PARTIALSCS

5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	88	0.50	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan target jangka menengah.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	88	0.60	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmarks Kinerja), jika ada.	88	0.80	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kinerja atau capaian kinerja secara utuh, nyata dan valid.	88	0.70	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara utuh, nyata dan valid.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atau penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.	88	0.70	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara efisien.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Husnulwadi perbaikan kinerja).	88	0.70	Laporan kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja secara perbaikan dan penyempurnaan.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
11	Pelebaran Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyelenggaraan strategikabijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.	7.54	75.00%	6.58		
12	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan (Tanggung Jawab).	88	0.70	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian utama pimpinan.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
13	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.	88	0.60	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan aktivitas untuk mencapai kinerja.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
14	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja.	88	0.70	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan anggaran untuk mencapai kinerja.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.
15	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian realisasi kinerja.	88	0.70	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian realisasi kinerja.	14. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini. 15. Apakah seluruh data terdapat dalam dokumen ini? A. Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini. B. Sebagian data terdapat dalam dokumen ini. C. Tidak ada data yang terdapat dalam dokumen ini.	Ya, seluruh data terdapat dalam dokumen ini.

KEHUTABHATAN RIPTERIA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TANGUNG JARUNG BARAT
DINAS TANAMAN PAKSIAN DAN HORTIKULTURA
TANUN EVALUASI 2025

[illegible]

7	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya		D	3,70	sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	1. Apakah seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya? A. Ya, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (100%) B. Sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (75-99%) C. Sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (50-74%) D. Sebagian kecil informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (25-49%) E. Tidak ada informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (0-24%)	luas pda
8	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	75,46	6,71	15,74			
4.4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5,00	100,00%	5,00			
5	Perangkat Daerah telah mempunyai Matriks Tindak Lanjut		Y	1,00	perangkat daerah telah mempunyai matriks tindak lanjut dan rekomendasi hasil evaluasi SAP yang selaras	75,46	
4.5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkesinambungan dengan Sumber Daya yang memadai	7,50	83,33%	5,00			
6	Pemetaan Matriks Tindak Lanjut terlaksana		D	3,70	sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	1. Apakah seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya? A. Ya, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (100%) B. Sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (75-99%) C. Sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (50-74%) D. Sebagian kecil informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (25-49%) E. Tidak ada informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (0-24%)	luas pda
4.6	Implementasi SAP telah mendukung karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan basis yang nyata (konkrit) dalam pelaksanaan dan evaluasi kinerja	12,50	75,00%	6,25			
3	Secara keseluruhan maka hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah disimpulkan		D	0,70	kegiatan evaluasi internal hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah disimpulkan	1. Apakah seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya? A. Ya, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (100%) B. Sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (75-99%) C. Sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (50-74%) D. Sebagian kecil informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (25-49%) E. Tidak ada informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (0-24%)	luas pda
4	Tahap tercapai pengujian implementasi SAP dengan melaksanakan tindak lanjut atau rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		D	0,70	Apabila hasil evaluasi SAP berdampak pada peningkatan kualitas kinerja	1. Apakah seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya? A. Ya, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (100%) B. Sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (75-99%) C. Sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (50-74%) D. Sebagian kecil informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (25-49%) E. Tidak ada informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (0-24%)	luas pda
5	Tahap tercapai perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal		D	0,70	perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi SAP signifikan	1. Apakah seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya? A. Ya, seluruh informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (100%) B. Sebagian besar informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (75-99%) C. Sebagian informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (50-74%) D. Sebagian kecil informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (25-49%) E. Tidak ada informasi dalam laporan kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya (0-24%)	luas pda
RATA-RATA AKUNTABILITAS KINERJA		100,00	75,44%	75,44			



Ketang Perencanaan Dinas Tanjung Tinggi Baru dan Berdiklasi

Rita Lita, S.S., SP
NIP. 19601212 200012 2 001

H. Anis Rahmawati, S.E
NIP. 19700705 196003 2 001

Zelly Nulha Yusu, S.E
NIP. 19771110 200904 2 002

Nusa Nugah, A.Md
NIP. 19700430 200505 2 007

Ety Rahayu Fandi, S.B
NIP. 19900608 202504 2 007

Almad Syarif, S.AP
NIP. 19681212 196002 1 005

Tet Mulyanti
NIP. 19681225 200702 2 008

[Handwritten signatures and initials]